

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis Komparatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2012-2014, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Rasio Efektifitas PAD antara Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS tahun anggaran 2012-2014 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten TTS lebih baik dalam memobilisasi PAD dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten Kupang. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten TTS (102,16% atau sangat efektif) lebih baik dalam memobilisasi PAD dibandingkan dengan Pemerintah Kabupaten Kupang (90% atau cukup efektif).
2. Berdasarkan Rasio Efisiensi Belanja menunjukkan bahwa baik Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang maupun Pemerintah Daerah Kabupaten TTS tahun anggaran 2012-2014 cukup efisien dalam penggunaan anggaran belanja daerah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang mencapai 87% (cukup efisien) dan Kabupaten TTS mencapai 81,74% (cukup efisien).
3. Rasio Liquiditas
 - a. Rasio Lancar

Berdasarkan Rasio Lancar antara Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS tahun anggaran 2012-2014 menunjukkan bahwa Pemerintah

Daerah Kabupaten TTS lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Kupang. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata yang menunjukkan bahwa rasio lancar Pemerintah Daerah Kabupaten TTS lebih besar yaitu sebesar 37,35% dibandingkan dengan rasio lancar Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang hanya sebesar 33%.

b. Rasio kas

Berdasarkan Rasio Kas antara Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS tahun anggaran 2012-2014 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten TTS lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Kupang. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata yang menunjukkan bahwa rasio kas Pemerintah Daerah Kabupaten TTS sebesar 34,03% lebih besar dibandingkan dengan rasio kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang hanya sebesar 29%.

c. Rasio Cepat

Berdasarkan Rasio cepat antara Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS tahun 2012-2014 menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten TTS lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Kupang. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata yang menunjukkan bahwa jumlah aktiva lancar Pemerintah Daerah Kabupaten TTS untuk menjamin setiap hutang lancar jauh lebih besar yaitu sebesar 35,22% dibandingkan dengan jumlah aktiva lancar yang dijaminakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yaitu sebesar 30,54%.

d. Rasio Modal Kerja Terhadap Total Aset (Working Capital To Assets Ratio)

Berdasarkan Rasio modal kerja terhadap total aset menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten TTS jauh lebih baik dalam penyediaan modal kerja dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata yang menunjukkan bahwa rasio modal kerja terhadap aset Pemerintah Daerah Kabupaten TTS jauh lebih besar yaitu sebesar 0,12% dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yaitu sebesar 0,04%.

4. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang jauh lebih besar yaitu sebesar 365,1% dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten TTS yaitu sebesar 283,07%. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang lebih baik dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten TTS dalam memenuhi kewajiban finansialnya baik itu jangka pendek atau jangka panjang.

5. Rasio Hutang

a. Rasio Utang Terhadap Ekuitas

Berdasarkan rasio utang terhadap ekuitas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang lebih baik yaitu sebesar 0,03% dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten TTS yang hanya sebesar 0.01%.

b. Rasio Utang Terhadap Aset Modal

Berdasarkan rasio utang terhadap aset modal menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang lebih baik yaitu sebesar 0,04%

dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten TTS yang hanya sebesar 0,01%.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis perlu memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dan Kabupaten TTS untuk:

1. Lebih meningkatkan efektivitas anggaran PAD dengan cara memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.
2. Lebih meningkatkan efisiensi anggaran belanja dengan cara melaksanakan program dan kegiatan dengan pengendalian anggaran yang ketat sesuai dengan yang ditargetkan.
3. Menjaga posisi likuiditas dan menjaga keseimbangan aktiva lancar dengan cara membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total pasiva lancar (utang jangka pendek). Sehingga terlihat perkembangan posisi likuiditas tiap tahunnya.
4. Lebih meningkatkan rasio solvabilitas dengan cara pemerintah harus menyediakan dana lebih dalam jumlah tertentu agar dapat digunakan pada saat dibutuhkan sehingga pemenuhan kewajiban finansialnya baik itu jangka panjang maupun jangka pendek semakin meningkat.
5. Mengurangi pinjaman dari pihak kreditor agar jumlah ekuitas maupun aset modal untuk menjamin utang pun dapat berkurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1999. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*.
- Anonim. 1999. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- , 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- , 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- , 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- , 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- , 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- , 2012. *Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2012*.
- , 2012. *Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten TTS Tahun 2012*.
- , 2013. *Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2013*.
- , 2013. *Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten TTS Tahun 2013*.
- , 2014. *Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2014*.
- , 2014. *Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten TTS Tahun 2014*.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Edisi Kedua*. Penerbit Andi Offset; Yogyakarta